

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kajian Teoretis

2.1.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan secara luas sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Penyebab kemiskinan yaitu kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Ketidakmampuan untuk mencapai kesejahteraan mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang layak, khususnya tingkat pendapatan individu atau rumah tangga yang rendah (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Amartya Sen memelopori teori kapabilitas untuk analisis kemiskinan pada tahun 1980-an. Melalui gagasan ini, Sen menjadi tokoh yang pertama kali menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki sifat multidimensional. Menurut Sen, *"capability is a person's freedom to achieve actual beings and doings"* atau "kapabilitas adalah kebebasan seseorang untuk mencapai keberadaan dan tindakan yang sebenarnya." Dalam pandangannya, fokus utama pendekatan ini tidak hanya terletak pada peningkatan pendapatan atau sumber daya ekonomi, tetapi juga pada upaya memperluas kemampuan serta kebebasan individu dalam menentukan

pilihan hidupnya. Sen berpendapat bahwa pembangunan sosial harus difokuskan pada peningkatan kapabilitas masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Secara umum, teori kapabilitas yang dikemukakan Sen menegaskan bahwa keadilan dan pembangunan tidak hanya diukur dari distribusi pendapatan atau kekayaan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan mereka serta menentukan jalan hidup yang mereka pilih (Suresh, 2023).

Amartya Sen memandang kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan keterbatasan kapabilitas atau kemampuan individu. Keterbatasan tersebut diakibatkan oleh kurangnya kebebasan serta terbatasnya akses masyarakat terhadap berbagai aspek penting, seperti pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi. Ketika akses dan kebebasan tersebut tidak memadai, individu akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak menjadi terhambat (Qudsi & Ashar, 2025). Selain itu, Sen dalam teori kapabilitas menjelaskan bahwa apabila individu tidak dapat menjalankan hak-hak dasarnya secara optimal, maka terdapat kecenderungan bagi masyarakat untuk terperangkap dalam kondisi kemiskinan yang berlangsung dalam jangka panjang (Haidir & Setyari, 2024).

Menurut Suresh (2023) teori kapabilitas dapat diterapkan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, diantaranya:

1. Peningkatan akses pendidikan

Amartya Sen menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan karena memberikan manfaat langsung berupa peningkatan

kesejahteraan dan kebebasan individu. Melalui pendidikan, kemampuan kognitif dan kapasitas manusia dapat berkembang sehingga produktivitas ekonomi meningkat. Pada akhirnya, peningkatan produktivitas tersebut berdampak pada kenaikan pendapatan serta berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Peningkatan akses kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam kemiskinan.

3. Menciptakan lapangan pekerjaan

Ketersediaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan karena pendapatan dari pekerjaan menjadi sumber utama penghidupan bagi masyarakat.. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai serta penyediaan pelatihan keterampilan yang relevan guna meningkatkan kapasitas kerja masyarakat. Dengan meningkatnya keterampilan dan peluang kerja yang lebih baik, individu berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang berlandaskan teori kapabilitas tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan

dan kesempatan yang memadai untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat, yang akhirnya mengurangi kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Suresh, 2023).

Nurkse mengemukakan teori lingkaran setan kemiskinan yang menjelaskan kemiskinan dapat berlangsung secara terus-menerus. Contoh, seseorang yang mengalami kekurangan pangan secara terus-menerus akan menghadapi masalah gizi. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada menurunnya kesehatan. Ketika kesehatan memburuk dan kondisi fisik menjadi lemah, kemampuan individu untuk bekerja juga akan menurun. Rendahnya kapasitas kerja tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh, sehingga individu tersebut tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Situasi ini kemudian membentuk suatu siklus yang berulang. Hal ini berkaitan dengan ungkapan klasik yang menyatakan bahwa *“a country is poor because it is poor”* atau suatu negara tetap miskin karena berada dalam kondisi kemiskinan itu sendiri (Jhingan, 2022).

Nurkse dalam teori lingkaran setan kemiskinan mengidentifikasi dua bentuk lingkaran setan kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari segi penawaran, pendapatan masyarakat yang rendah karena produktivitas yang rendah mengurangi kemampuan menabung, sehingga pembentukan modal juga rendah. Akibatnya, negara kekurangan barang modal dan produktivitas tetap rendah. Sedangkan dari sisi permintaan, investasi di suatu negara rendah karena pasar yang terbatas, dan masyarakat memiliki pendapatan rendah. Pendapatan rendah kembali terkait dengan produktivitas yang rendah, yang berasal dari pembentukan modal yang terbatas di masa lalu (Sukirno, 2017).

Di samping itu, Meier dan Baldwin menyebutkan bahwa teori lingkaran setan kemiskinan berkaitan dengan hubungan antara masyarakat yang terbelakang dan potensi kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengelola berbagai aktivitas ekonomi secara efektif. Namun, banyak negara berkembang yang memiliki potensi kekayaan alam, sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan tenaga ahli, serta mobilitas sumber daya yang masih terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang relatif rendah, sehingga proses pembangunan masyarakat juga berjalan lebih lambat (Sukirno, 2017).

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan muncul sebagai akibat dari rendahnya tingkat produktivitas, yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan masyarakat juga rendah. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Menurut Kuncoro dalam Rohima & Budiyanto (2024), faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, diantaranya:

1. Pada tingkat makro, disebabkan oleh ketimpangan dalam pola kepemilikan sumber, yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata, masyarakat miskin umumnya hanya menguasai sumber daya dalam jumlah terbatas dengan kualitas yang relatif rendah.

2. Kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia, yang mengakibatkan produktivitas rendah dan gaji rendah.
3. Kemiskinan diakibatkan oleh akses yang tidak merata terhadap modal.

Menurut Purnawati dkk. (2023) karena permasalahan kondisi kemiskinan bersifat multidimensional, sehingga kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan keadaan tingkat pendapatan individu atau sekelompok masyarakat berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan untuk menunjang kualitas hidup yang layak.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan pembangunan yang belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Wilayah yang kurang tersentuh oleh program pembangunan dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan pola perilaku individu atau kelompok masyarakat yang berakar pada nilai budaya atau adat istiadat tertentu. Nilai dan kebiasaan tersebut cenderung kurang mendorong upaya peningkatan taraf hidup melalui cara-cara yang lebih modern. Pola perilaku yang dimaksud antara lain sikap pasif terhadap perubahan, kurangnya

kebiasaan hidup hemat, rendahnya kreativitas, serta tingginya ketergantungan pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya yang biasanya terjadi dalam struktur sosial-budaya atau sosial-politik yang tidak mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini sering kali disertai dengan unsur ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif.

Selanjutnya, Purnawati dkk. (2023) membagi jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, sebagai berikut:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, kurangnya atau tidak tersedianya prasarana dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta kondisi lahan yang tidak subur. Wilayah dengan karakteristik tersebut umumnya merupakan daerah yang belum tersentuh secara optimal oleh kebijakan pembangunan, sehingga sering dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh konsekuensi dari proses modernisasi dan pembangunan yang tidak memberikan kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses sumber daya, sarana, maupun fasilitas ekonomi. Kondisi ini dipandang sebagai dampak negatif dari penerapan pendekatan pembangunan yang banyak diterapkan di negara-negara

berkembang. Tujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, misalnya sektor industri menghasilkan lebih banyak uang daripada orang-orang yang bekerja di bidang pertanian.

Badan Pusat Statistik (2024a) mendefinisikan penduduk miskin sebagai masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran kemiskinan secara umum serta menilai dampak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan tersebut, ditetapkan suatu batas minimum sebagai indikator kesejahteraan untuk mengelompokkan penduduk ke dalam kategori miskin dan tidak miskin. Batas minimum ini dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) menggambarkan besarnya pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Kebutuhan pangan dasar tersebut mencakup 52 jenis komoditas, antara lain padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan komoditas lainnya. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mencakup kebutuhan dasar non pangan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Komponen ini terdiri dari 51 kelompok komoditas di wilayah perkotaan dan 47 kelompok komoditas di wilayah perdesaan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2025) menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di provinsi, dihitung sebagai berikut:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Keterangan:

$\%PM_p$: Persentase penduduk miskin provinsi

PM_p : Jumlah penduduk miskin provinsi

P_p : Jumlah penduduk provinsi

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index* (HCI = P0)

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1)

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2)

Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Penelitian ini menggunakan indikator kemiskinan *Head Count Index* (P0) yang telah dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984) mengenai suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α : 0, 1, 2; jika $\alpha=0$ disebut *Head Count Indeks* (P0), jika $\alpha=1$ disebut Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1), jika $\alpha=2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2)

Z: Garis kemiskinan

Y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, \dots, q$), $Y_i < Z$

q: Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n: Jumlah penduduk

Kemiskinan adalah kunci bagi pembangunan dan menjadi isu penting di seluruh dunia. Pada bulan Oktober 2000 melalui penandatanganan dan deklarasi *Millennium Development Goals (MDGs)*, Indonesia bersama 188 negara sepakat untuk mengurangi kemiskinan. Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pembangunan nasional Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pemerintah harus mengatasi masalah ini untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat kedaulatan negara (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

2.1.1.2 Pekerja Informal

Bekerja merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai bekerja apabila dilakukan minimal selama satu jam dalam

satu minggu terakhir. Selain itu, bekerja juga mencakup kegiatan pekerja tidak dibayar yang berperan membantu dalam suatu bisnis atau aktivitas ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Sektor informal merupakan wadah bagi tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, yang berfungsi sebagai alternatif sumber penghidupan, sehingga menurunkan tingkat pengangguran, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan (Supraja & Artosa, 2023). Keterlibatan dalam sektor informal menjadi cara bagi masyarakat untuk mempertahankan kehidupan, meskipun memiliki tingkat upah yang rendah, tetapi dapat menambahkan penghasilan masyarakat, sehingga pekerja informal memiliki potensi dalam pengurangan kemiskinan (Etefa, 2023).

Di sisi lain, Chrise Manning dan Tadjuddin Noer Efendi menyatakan bahwa sektor informal adalah usaha kecil yang beroperasi di luar sistem ekonomi formal. Sektor ini berperan dalam kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa guna menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan, meskipun umumnya tidak terorganisasi secara formal dan tidak terdaftar dalam administrasi pemerintahan. Sektor ini ditandai oleh usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau keluarga dengan modal terbatas, organisasi yang longgar dan bersifat informal, tenaga kerja yang kurang terampil atau tingkat pendidikan rendah, keamanan kerja yang rendah karena kurangnya akses ke jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja, serta produktivitas rendah karena kurangnya modal, teknologi, dan keterampilan. Secara historis, sektor informal berasal dari teori dualisme baru yang

pernah populer dalam penjelasan klasik Boeke. Seorang antropolog Inggris yaitu Keith Hart menciptakan istilah sektor informal pada tahun 1973 (Putri dkk., 2024).

Teori dual economy yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis membagi perekonomian ke dalam dua sektor, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional, yang umumnya didominasi oleh kegiatan pertanian, ditandai oleh kelebihan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Sementara itu, sektor modern yang meliputi industri dan jasa menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi serta kesempatan kerja yang lebih baik (Chatra, 2025).

Selain itu, teori dualisme ekonomi yang dikemukakan oleh Lewis menyatakan bahwa keberadaan sektor informal sebagai konsekuensi dari kapasitas penyerapan tenaga kerja yang terbatas di sektor formal. Teori ini menjelaskan bahwa sektor informal menjadi tempat berlindung bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kesempatan di sektor formal. Ketika perekonomian tidak mampu menyediakan lapangan kerja formal yang memadai, tenaga kerja terdorong beralih ke sektor informal sebagai strategi bertahan hidup. Namun, rendahnya produktivitas, pendapatan yang rendah, serta keterbatasan perlindungan kerja menyebabkan sektor ini sulit menjadi sarana mobilitas ekonomi keluar dari kemiskinan. Bahkan, peningkatan upah di sektor informal sering kali tidak cukup signifikan untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup, sehingga pekerja tetap berada dalam kondisi rentan dan berpotensi terjebak dalam lingkaran kemiskinan (Perseveranda, 2025; Rahmadhani & Sakti, 2025).

Pandangan tersebut didukung oleh teori upah efisiensi yang dikemukakan Carl Shapiro dan Joseph E. Stiglitz, keterkaitan antara upah dan produktivitas

bersifat dua arah. Di satu sisi, peningkatan upah dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif karena memotivasi pekerja untuk bekerja secara optimal. Di sisi lain, tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi cenderung memperoleh upah yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas kontribusinya terhadap perusahaan (Tufaner, 2026).

Dalam teori upah efisiensi, peningkatan tingkat upah dapat mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan cenderung sulit menurunkan upah meskipun terjadi surplus tenaga kerja di pasar. Meskipun pengurangan upah dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan produktivitas pekerja yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan sering kali mempertahankan tingkat upah yang relatif tinggi sebagai upaya menjaga kinerja dan efisiensi tenaga kerja (Agusalim & Novianti, 2024).

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja diklasifikasikan menjadi pekerja formal dan informal. Penduduk yang bekerja di sektor formal terdiri dari status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti, berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian dan non pertanian, serta pekerja keluarga/tak dibayar (Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa status pekerjaan menunjukkan posisi individu dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Status pekerjaan diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Berusaha sendiri merupakan bekerja atas risiko sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti, tukang ojek yang membawa motor ojek atas risiko sendiri, dan sopir taksi yang membawa mobil atas risiko sendiri.
2. Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap merupakan individu yang dalam menjalankan usaha dibantu oleh anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap. Seperti, pengusaha warung yang dibantu oleh anggota rumah tangganya atau orang lain yang diberi upah tidak tetap, pedagang keliling yang dibantu anggota rumah tangganya atau seseorang yang diberi upah hanya pada saat membantu saja, dan petani yang mengusahakan tanah pertaniannya dengan dibantu pekerja tak dibayar. Walaupun pada waktu panen, petani tersebut memberikan hasil bagi panen, pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap.
3. Berusaha dengan dibantu buruh tetap merupakan individu yang melakukan usaha dengan memperkerjakan buruh tetap yang dibayar. Seperti, pemilik toko memperkerjakan satu atau lebih buruh tetap, dan pengusaha sepatu yang memakai buruh tetap.
4. Buruh/karyawan merupakan individu yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak memiliki majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam satu bulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal satu bulan pada satu majikan.

5. Pekerja bebas di pertanian merupakan individu yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian, baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga, atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan berupa uang atau barang, dengan sistem pembayaran harian atau borongan. Usaha pertanian meliputi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Selain itu, pekerja bebas di non pertanian merupakan individu yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah dan imbalan, baik berupa uang dan barang, dan sistem pembayaran harian atau borongan. Serta, usaha di non pertanian meliputi, usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, air dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
6. Pekerja keluarga merupakan individu yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Pekerja keluarga tersebut dapat dikategorikan, sebagai berikut:
 - a. Sebagai anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya seperti istri/anak yang membantu suami/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.

- b. Bukan sebagai anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti keluarga yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.
- c. Bukan sebagai anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tetangganya dan tidak dibayar.

Sektor formal belum mampu menyerap seluruh pengangguran akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk, sehingga sektor informal menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Sektor ini berperan dalam menyerap tenaga kerja, terutama bagi penduduk dengan tingkat pendidikan rendah, karena umumnya tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu. Meskipun berperan penting dalam perekonomian berskala kecil, sektor informal umumnya ditandai oleh tingkat upah yang rendah, struktur usaha yang tidak formal, serta tidak terdaftar secara resmi, sehingga dalam banyak kasus pekerja informal berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan (Pramesti & Effendi, 2025).

2.1.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika manfaat dari proses pembangunan suatu negara tidak dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk. Kuncoro menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut berkaitan dengan perbedaan standar hidup dalam masyarakat. Disparitas antarwilayah muncul sebagai akibat dari variasi faktor *endowment*, seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta kepemilikan modal. Perbedaan faktor-faktor tersebut menyebabkan capaian pembangunan yang tidak seragam di berbagai daerah, yang

pada akhirnya mengakibatkan kesenjangan kesejahteraan antarwilayah dalam suatu negara (Majid dkk., 2025).

Koefisien Gini, diambil dari nama Gini, merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Setidaknya ada tiga cara untuk mendefinisikan koefisien Gini. Pendekatan pertama, yang dikenal sebagai pendekatan geometris, menggambarkan koefisien Gini sebagai rasio atau perbandingan luas antara garis persamaan mutlak dan kurva Lorenz terhadap luas total di bawah garis persamaan mutlak. Kedua, koefisien gini sebagai rasio konsentrasi. Ketiga, koefisien gini sebagai fungsi dari kovarians antara pendapatan dan peringkat (Majid dkk., 2025).

Di samping itu, Badan Pusat Statistik (2024a) menyatakan Index Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dengan rumus koefisien Gini, sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_K - X_{K-1}) (Y_K - Y_{K-1})$$

Keterangan:

G: Koefisien gini.

X_k : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2 \dots n$ dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$.

Y_k : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2 \dots n$ dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$.

Nilai koefisien gini berkisar antara 0 yang artinya sangat merata, sedangkan mendekati 1 sangat timpang. Dengan kriteria ukuran rasio gini meliputi ketimpangan rendah lebih kecil dari 0,3, kategori sedang antara 0,3-0,5, dan lebih besar dari 0,5 termasuk kategori tinggi (Soelistyo, 2023).

Menurut Hartono dalam Soelistyo (2023) menyatakan bahwa teori ketimpangan oleh Simon Kuznets mengungkapkan pola berbentuk U terbalik yang terkait dengan ketidaksetaraan antarwilayah. Pola ini menunjukkan bahwa pada tahap awal proses pembangunan, distribusi pendapatan cenderung mengalami peningkatan ketimpangan. Namun, setelah pembangunan mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi diikuti oleh perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Melalui teori Kuznets, ditegaskan bahwa tercapainya pemerataan memerlukan proses pembangunan dalam jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah akan semakin berkurang sejalan dengan proses pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, Yansuri dkk. (2025) menjelaskan teori ketimpangan oleh Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan sering disertai peningkatan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan rasio gini, sehingga ketimpangan dapat meningkatkan kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok berpendapatan rendah tetap dalam kondisi kemiskinan. Situasi ini membatasi akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta modal produktif, sehingga memperkuat perangkap kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial ekonomi.

Teori Kuznets berpendapat bahwa kelompok berpenghasilan tinggi lebih banyak berkontribusi pada akumulasi modal dan tabungan, Sebaliknya, kelompok masyarakat lainnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk menabung. Kesenjangan dalam kemampuan menabung ini, dengan asumsi faktor lain tetap, akan meningkatkan proporsi pendapatan yang diterima oleh kelompok berpendapatan tinggi serta memperkuat dominasi ekonomi mereka, sehingga pada akhirnya memperbesar tingkat ketimpangan pendapatan (Hermawan & Taher, 2025). Selaras dengan pandangan tersebut, semakin tidak merata distribusi pendapatan suatu masyarakat, maka semakin besar pula proporsi penduduk yang memiliki tingkat pendapatan berada di bawah garis kemiskinan (Sukirno, 2017).

2.1.1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan dinamika perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Ketiga komponen tersebut disusun berdasarkan data historis yang menggambarkan pola perkembangan penduduk di masa lalu, berbagai faktor yang berpengaruh, serta hubungan saling keterkaitan di antara komponen-komponen tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023c).

Laju pertumbuhan penduduk per tahun merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap jumlah penduduk pada tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Selain itu, Badan Pusat Statistik (2023a) menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmetika,

geometrik, dan eksponensial. Badan Pusat Statistik menghitung laju pertumbuhan penduduk menggunakan pendekatan metode geometrik, sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Keterangan:

r (*rate*): laju pertumbuhan penduduk per tahun (biasanya dikonversi ke persen).

P_t: jumlah penduduk pada tahun akhir periode.

P₀: jumlah penduduk pada tahun dasar (awal periode).

t: jangka waktu antar dua tahun pengamatan (dalam tahun).

Laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 0 artinya terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk sama dengan 0 artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk lebih kecil dari 0 artinya terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 1798, Thomas Robert Malthus mengemukakan teori mengenai dinamika pertumbuhan penduduk dalam karyanya yang berjudul *An Essay on the Principle of Population*. Dalam tulisan tersebut, Malthus menjelaskan bahwa populasi suatu negara cenderung bertambah mengikuti deret ukur, sedangkan produksi pangan hanya meningkat menurut deret hitung. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pertumbuhan penduduk melampaui kapasitas penyediaan pangan, sehingga pendapatan per kapita yang didefinisikan sebagai ketersediaan pangan per

orang akan terus menurun hingga masyarakat berada pada tingkat kehidupan yang mendekati batas subsisten. Apabila jumlah penduduk melebihi daya dukung tersebut, sebagian masyarakat bahkan berisiko tidak memperoleh pangan sama sekali. Berdasarkan pandangan tersebut, Malthus berpendapat bahwa cara untuk menghindari kemiskinan adalah melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, khususnya dengan menerapkan pembatasan kelahiran yang didasari kesadaran moral (Wahed dkk., 2021).

Di sisi lain, teori kependudukan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels memiliki pandangan yang berbeda dengan Malthus mengenai permasalahan kependudukan. Marx menegaskan bahwa tekanan pertumbuhan penduduk tidak tertuju pada ketersediaan bahan pangan, melainkan terhadap keterbatasan kesempatan kerja. Menurutnya, penambahan jumlah penduduk justru berpotensi meningkatkan output produksi, sehingga pembatasan kelahiran tidak dianggap sebagai solusi yang diperlukan. Marx berpendapat bahwa kemiskinan dan kemelaratan bukan disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, tetapi karena struktur masyarakat yang mendorong kemiskinan (Seran, 2023).

Namun, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi, salah satunya adalah meningkatnya jumlah tanggungan dalam setiap keluarga. Kondisi ini menyebabkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga menjadi semakin besar karena harus memenuhi kebutuhan lebih banyak anggota keluarga. Di sisi lain, keterbatasan pendapatan membuat kemampuan keluarga untuk menanggung tambahan anggota keluarga menjadi terbatas. Oleh karena itu, keluarga dengan jumlah tanggungan

yang lebih banyak cenderung lebih rentan menghadapi permasalahan kemiskinan (Sukirno, 2017).

2.1.1.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi terciptanya pekerjaan yang layak sekaligus menjadi jalur paling efektif untuk keluar dari kemiskinan. Melalui pendidikan, individu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, serta menekan risiko kemiskinan. Pada tingkat masyarakat, pendidikan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk memperkuat investasi pada pendidikan yang berkualitas, mengatasi permasalahan krisis pembelajaran, serta membekali generasi muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mewujudkan pengentasan kemiskinan (World Bank, 2025).

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas (Badan Pusat Statistik, 2024a). Sebagai indikator sosial, rata-rata lama sekolah digunakan untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain menunjukkan durasi pendidikan yang ditempuh, rata-rata lama sekolah juga menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang berpotensi memengaruhi kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu wilayah (Shafiyah & Imaningsih, 2025).

Teori *human capital* yang dikemukakan oleh Gary Becker menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam upaya menurunkan tingkat

kemiskinan. Becker menjelaskan bahwa individu yang memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kondisi kemiskinan. Dalam kerangka teori ini, peningkatan tingkat pendidikan dipandang mampu meningkatkan produktivitas individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan (Qudsi & Ashar, 2025).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023b) rata-rata lama sekolah dihitung dari jumlah lamanya sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk 25 umur tahun ke atas. Rumus rata-rata lama sekolah, sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

RLS (Rata-Rata Lama Sekolah): rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam suatu wilayah.

n: jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang menjadi objek penghitungan.

$\sum$ (Sigma): total seluruh nilai lama sekolah individu dalam populasi yang dihitung.

i=1: individu ke-1 hingga individu ke-n dalam data penduduk yang dianalisis.

x_i : lama sekolah dalam tahun yang telah ditempuh oleh individu ke-i, dihitung berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan.

Rata-rata lama sekolah memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Pada umumnya, semakin tinggi jenjang pendidikan

yang ditempuh, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dengan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga berperan dalam menekan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali membatasi akses individu terhadap kesempatan kerja yang lebih baik dan menyebabkan bertahan dengan pekerjaan berupah rendah, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan (Shafiyah & Imaningsih, 2025).

2.1.2 Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perseveranda (2025) Pekerja Sektor Informal sebagai Determinan Jebakan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan, No. 3, Vol. 7, ISSN 2503- 3093.	Variabel bebas yaitu pekerja informal, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Variabel bebas yaitu upah pekerja sektor informal regresi linier berganda, lokasi penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode penelitian 2023.	Pekerja sektor informal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan upah pekerja sektor informal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Ramasimu dkk. (2023) <i>Contributions and Challenges of Informal Trades in Local Economic Development</i> <i>Corporate Governance and Organizational Behavior</i> Review, No.2, Vol. 7, ISSN 25211889	Variabel bebas yaitu pekerja informal, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Metode statistik deskriptif, lokasi penelitian di Kotamadya Lokal Thulamela, Afrika Selatan, periode penelitian 2022.	Pekerja informal memberikan kontribusi negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan pendapatan.
3.	Khoiruddin dkk. (2025) <i>Informality and multi-dimensional child poverty: evidence from urban and rural Indonesia</i> <i>Development Studies Research</i> , Vol. 12, No. 1, ISSN 2166-5095	Variabel bebas yaitu pekerja informal, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Variabel bebas yaitu pekerja formal, sosio-demografis, akses perlindungan sosial, regresi logistik biner dan multi-nominal, lokasi penelitian di Indonesia, periode penelitian 2022.	Pekerja informal dapat meningkatkan kemiskinan anak terutama di daerah pedesaan. Pekerja formal, dan akses perlindungan sosial dapat mengurangi kemiskinan anak. Sosiodemografis dapat meningkatkan kemiskinan anak.
4.	Sihotang dkk. (2023) <i>Labor Conditions, Wages and Non-Cash Transfers in Poverty in Eastern Indonesia</i> <i>Journal of Scientific Research</i> ,	Variabel bebas yaitu pekerja sektor informal, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu pinjaman mikro, tingkat pendapatan, lokasi penelitian di Wilayah Indonesia Timur, periode penelitian 2016-2021.	Pekerja sektor informal berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, bantuan pangan non tunai tidak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Education, and Technology (JSRET)</i> , Vol. 2, No. 1, ISSN 2962-6110			berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
5.	Kinanti dkk. (2019) Pengaruh Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat	Variabel bebas yaitu pekerja informal, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Regresi linear sederhana, periode penelitian 2015-2019, lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Barat.	Persentase sektor informal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
	<i>Cross-border</i> , Vol. 2, No. 2, ISSN 2615-3165.			
6.	Apriyanti & Rospida (2025) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia 2014-2023 Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), Vol. 9, No. 2, ISSN 2541-5255.	Variabel bebas yaitu indeks gini, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Variabel bebas yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, regresi linear berganda, lokasi penelitian di Indonesia, periode penelitian 2014-2023.	IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan kemiskinan, indeks gini berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Tope dkk. (2025) <i>Impact of Gini Ratio, Economic Growth and Unemployment on Poverty Levels: A Panel Data Analysis</i> <i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> , Vol. 15, No. 5, ISSN 2146-4138.	Variabel bebas yaitu <i>gini ratio</i> , variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah, periode penelitian 2019-2023.	Secara parsial <i>Gini rasio</i> , dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi positif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
8.	Saerendra dkk. (2025) Pengaruh Indeks Zakat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini terhadap Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2019-2024) Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 10,	Variabel bebas yaitu rasio gini, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu indeks zakat nasional, indeks pembangunan manusia, upah minimum, pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten, periode penelitian 2019-2024.	Secara parsial indeks zakat nasional, dan rasio gini tidak berpengaruh dan positif terhadap kemiskinan, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka tidak berpengaruh dan negatif terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	No.2, ISSN 2580-5800.			
9.	Manalu dkk. (2024) Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, dan <i>Gini Rasio</i> terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022 VALUE, Vol. 4, No.2, ISSN 2723-6951.	Variabel bebas yaitu <i>gini ratio</i> , variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Variabel bebas yaitu laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, regresi linear berganda, lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah, periode penelitian 2013-2022.	Laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh dan negatif terhadap kemiskinan, PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, <i>gini ratio</i> tidak berpengaruh dan positif terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.
10.	Ngabito dkk. (2024) Analisis Sektor Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan per Kapita terhadap Kemiskinan di Sulawesi Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 2, No. 1, ISSN 3021-8063.	Variabel bebas yaitu <i>gini ratio</i> , variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier, lokasi penelitian di Pulau Sulawesi, periode penelitian 2011-2020.	Sektor primer berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sektor sekunder berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, sektor tersier berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, dan <i>gini ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	C. Putri & Yefriza (2025) Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Jesya, Vol. 8, No.1, ISSN 2599-3410.	Variabel bebas yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu belanja pemerintah, tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Bengkulu, periode penelitian 2019-2023.	Belanja pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
12.	M. A. Aulia (2025) Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM dan Laju PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus 10 Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 2, ISSN 2828-5271.	Variabel bebas yaitu laju pertumbuhan penduduk, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, laju PDRB, lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah, periode penelitian 2020-2024.	Secara parsial laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan laju PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
13.	Rezki dkk. (2024) <i>Population Growth, Foreign Direct Investment, and</i>	Variabel bebas yaitu laju pertumbuhan penduduk, variabel	Variabel bebas yaitu investasi langsung, indeks pembangunan manusia	Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Human Development Index on Poverty In Indonesia</i> Jurnal Ekonomi Balance, Vol. 20, No. 2, ISSN 2686-5467.	terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	regresi linear berganda, lokasi penelitian di Indonesia, periode penelitian 2004-2022.	investasi langsung asing berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, IPM tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
14.	Epinda & Sinaga (2023) Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jayapura tahun 2011-2021 Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN (ABDIMAS SEAN), Vol. 1, No. 2, ISSN 2986-6227.	Variabel bebas yaitu laju pertumbuhan penduduk, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Variabel bebas yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, regresi linear berganda, lokasi penelitian di Kota Jayapura, periode penelitian 2011-2021.	Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan, laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
15.	Septadarman & Rambe (2024) <i>Analysis of the Influence of Population Growth, Education, and Health on Poverty in</i>	Variabel bebas yaitu laju pertumbuhan penduduk, pendidikan, variabel terikat kemiskinan,	Variabel bebas yaitu kesehatan, lokasi penelitian di Indonesia, periode penelitian 2018-2022.	Laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Secara parsial pendidikan, dan kesehatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Indonesia from 2018 to 2022</i> <i>East Asian Journal of Multidisciplinary Research</i> , Vol. 3, No. 1, ISSN 2828-1519.	Pendekatan kuantitatif, regresi data panel.		berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
16.	Shafiyah & Imaningsih (2025) <i>Determination of Income Inequality, Average Length of Schooling, Economic Growth, Domestic Investment on Poverty Levels in the Province of the Special Region of Yogyakarta</i> <i>Formosa Journal of Multidisciplinary Research</i> , Vol. 4, No. 4, ISSN 2829-8896.	Variabel bebas yaitu rata-rata lama sekolah, ketimpangan pendapatan dengan menggunakan <i>gini ratio</i> , variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif.	Variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, PMDN, lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, periode penelitian 2009-2023, regresi linear berganda.	Secara parsial ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan PMDN berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
17.	Safitri & Gunarto (2025) <i>Analysis Of The Effect Of Population, Gini Ratio and Education on Poverty in Papua Province 2015-2022</i>	Variabel bebas yaitu pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama sekolah, <i>gini ratio</i> , variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif,	Variabel bebas yaitu jumlah penduduk, lokasi penelitian di Provinsi Papua, periode penelitian 2015-2022.	Secara parsial jumlah penduduk, dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, rasio <i>gini</i> tidak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Secara simultan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>International Journal of Economics, Business and Innovation Research</i> , Vol. 4, No. 2, ISSN 2964-0865.	regresi data panel.		berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
18.	Mannan & Arifin (2025) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2, ISSN 2808-1307.	Variabel bebas yaitu pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama sekolah, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, lokasi penelitian di Pulau Jawa, periode penelitian 2010-2022.	IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial PDRB, dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
19.	M. Sinaga dkk. (2023) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan per Kapita dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kepulauan Nias Jurnal Ekuilnomi, Vol. 5, No. 1, ISSN 2614-7181.	Variabel bebas yaitu pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama sekolah, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu pendapatan per kapita, pengangguran, lokasi penelitian di Kepulauan Nias, periode penelitian 2014-2022.	Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
20.	Surbakti dkk. (2023) Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021 Ecoplan, Vol. 6, No. 1, ISSN 2615-5575.	Variabel bebas yaitu rata-rata lama sekolah, variabel terikat kemiskinan, pendekatan kuantitatif, regresi data panel.	Variabel bebas yaitu angka melek huruf, jumlah penduduk, lokasi penelitian di Indonesia, periode penelitian 2015-2021.	Angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menguraikan hubungan antara variabel bebas, yakni pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan, dengan variabel terikat yaitu kemiskinan. Penyusunan kerangka ini didasarkan pada landasan teori, hasil penelitian relevan, serta argumentasi logis yang digunakan untuk memperkuat perumusan hipotesis penelitian.

2.2.1 Hubungan Pekerja Informal dengan Kemiskinan

Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan sektor informal, yang kerap menjadi alternatif utama bagi masyarakat miskin. Sektor ini umumnya mencakup jenis pekerjaan yang tidak dilengkapi dengan kontrak formal, tanpa perlindungan jaminan sosial, serta memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil, seperti pedagang kaki lima, buruh harian lepas, dan pekerja rumah tangga (Perseveranda, 2025). Pekerja di sektor informal terperangkap dalam pekerjaan yang membutuhkan sedikit keahlian dan menawarkan peluang yang sangat terbatas untuk peningkatan pendapatan. Hal ini menyebabkan stagnasi sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan di pasar tenaga kerja serta memperparah tingkat kemiskinan (Holivil, 2024).

Hal ini sejalan dengan W. Arthur Lewis yang mengemukakan teori dualisme ekonomi menjelaskan bahwa dalam suatu negara terdapat dua struktur perekonomian yang berjalan berdampingan, yakni sektor tradisional dan sektor modern (Nurhayati dkk., 2024). Lewis berpendapat bahwa ketika perekonomian tidak sanggup menyediakan lapangan kerja formal yang memadai, masyarakat akan terdorong mencari penghidupan di sektor informal. Namun, hal ini berpotensi meningkatkan kemiskinan karena memiliki upah yang rendah, dan rentan terhadap guncangan ekonomi (Rahmadhani & Sakti, 2025).

Hasil penelitian oleh Aulia & Dewi (2025), Suratini dkk. (2025), dan Pulungan & Haryanto (2024) menyatakan bahwa pekerja informal berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi proporsi pekerja di sektor ini, semakin tinggi kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh

karakteristik sektor informal yang memiliki upah rendah, pendapatan tidak stabil, pendidikan yang rendah, perlindungan sosial yang kurang memadai, keterbatasan akses terhadap jaminan ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan. Meskipun sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi kelompok rentan di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, pendapatan yang dihasilkan umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini membuat rumah tangga pekerja informal sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga barang maupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya, kondisi ini memperkuat terjadinya siklus kemiskinan yang sulit diputus dalam jangka panjang. Selain itu, pekerja informal dapat meningkatkan kemiskinan rumah tangga disebabkan oleh usia, pendidikan, akses terhadap internet, sektor pekerjaan, status pekerjaan, jumlah jam kerja, jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga bekerja, dan akses terhadap kredit.

2.2.2 Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini, dengan nilai rasio gini yang semakin tinggi mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kondisi ketimpangan ini kerap menjadi hambatan dalam penanggulangan kemiskinan, karena kelompok berpendapatan rendah sering kali tidak memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara adil (Apriyanti & Rospida, 2025).

Menurut Todaro dan Smith, tingginya kesenjangan pendapatan dapat melemahkan manfaat kemajuan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan. Apabila hasil pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas menjadi terbatas. Selain itu,

ketimpangan juga berpotensi menghambat investasi dalam modal manusia, karena kelompok miskin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Akibatnya, produktivitas serta daya saing tenaga kerja dari kelompok miskin menjadi rendah, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan (Rinaldi dkk., 2025).

Hal ini sejalan dengan teori Simon Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan sering disertai peningkatan ketimpangan pendapatan yang dapat meningkatkan kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok berpendapatan rendah tetap dalam kondisi kemiskinan (Yansuri dkk., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia dkk. (2025), Mulyani dkk. (2024), dan Ariyani & Nafisyah (2024) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dengan menggunakan rasio gini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan karena ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok berpendapatan rendah tetap dalam kondisi kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Selain itu, ketimpangan yang dipengaruhi oleh perbedaan teknologi, kualitas tenaga kerja, infrastruktur, serta potensi sumber daya antarwilayah akan berpotensi meningkatkan kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Kemiskinan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu tempat dalam periode waktu tertentu, umumnya dinyatakan sebagai persentase setiap tahun (Rezki dkk., 2024). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi mendorong pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan. Bertambahnya penduduk mendorong lonjakan kebutuhan akan sumber daya, seperti lapangan pekerjaan, pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kemiskinan (Septadarman & Rambe, 2024).

Hal ini sejalan dengan teori Malthus yang menegaskan bahwa pertambahan penduduk yang tinggi berpotensi meningkatkan kemiskinan, karena ketersediaan sumber daya alam dan kapasitas ekonomi tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan tersebut. Penurunan produktivitas dan infrastruktur yang tidak memadai dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi akibat laju penduduk yang cepat (Aulia, 2025).

Penelitian Yulinda dkk. (2024), Salsabil & Rianti (2023), dan Yanthi & Wenagama (2022) menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan dan meningkatkan kemiskinan. Lonjakan jumlah penduduk meningkatkan persaingan dalam memperoleh lapangan kerja, sedangkan

kapasitas penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, sering kali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Perbedaan kualitas sumber daya manusia menjadi kendala bagi pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Akibatnya, terjadi keterbatasan peluang kerja yang berdampak terhadap peningkatan kemiskinan, apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa pengendalian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2.4 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Menurut Jhingan, salah satu ciri negara berkembang yang berperan sebagai penyebab dari kemiskinan adalah keterbatasan prasarana dan sarana pendidikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya angka buta huruf serta rendahnya penguasaan keterampilan dan keahlian di kalangan masyarakat (Purnawati & Yuniarti, 2021).

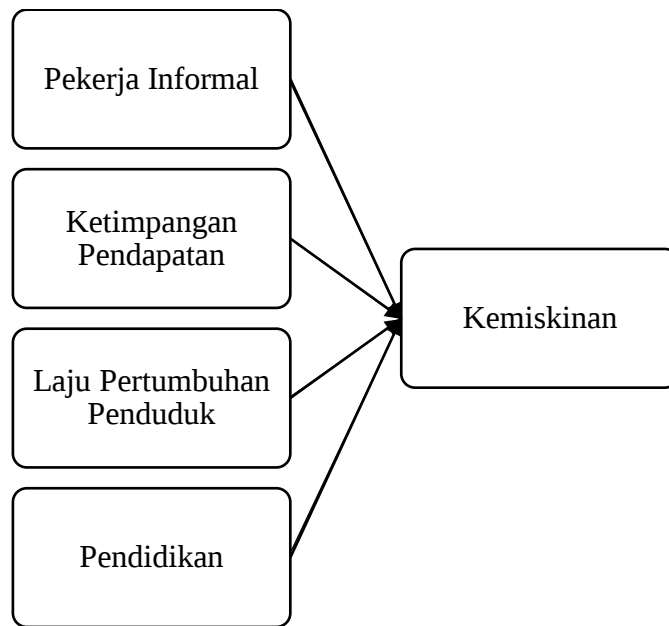
Selain itu, pendidikan memegang peranan strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan karena berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian individu. Oleh sebab itu, pengembangan pendidikan secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Aini & Nugroho, 2023). Lebih lanjut, penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki risiko yang lebih kecil untuk jatuh ke dalam kondisi kemiskinan (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yang dikemukakan oleh Becker menjelaskan bahwa individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai cenderung mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan

dengan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan (Safitri & Gunarto, 2025).

Penelitian oleh Padang dkk. (2025), Rahim dkk. (2024), dan Salsabil & Rianti (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pendidikan memiliki peranan strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama melalui peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Semakin lama seseorang menempuh pendidikan, semakin tinggi pula keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas yang dimiliki, sehingga memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi juga memperluas akses terhadap informasi, teknologi, dan kesempatan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memperbaiki kualitas hidup. Dengan demikian, peningkatan pendidikan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran dapat disimpulkan bahwa pekerja informal, dan pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, ketimpangan pendapatan, dan laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disusun sebagai jawaban awal atas permasalahan penelitian dan harus diuji kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah serta tinjauan pustaka yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pekerja informal, ketimpangan pendapatan dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif, sedangkan pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2024.
2. Diduga secara bersama-sama pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2024.